



BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



POKJANAS TPID-copyright

TANTANGAN DAN FOKUS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

(TINDAK LANJUT RAKORNAS VII TPID)

Jakarta, 26 September 2016



1

PERKEMBANGAN TERKINI INFLASI DAN TANTANGAN KE DEPAN

2

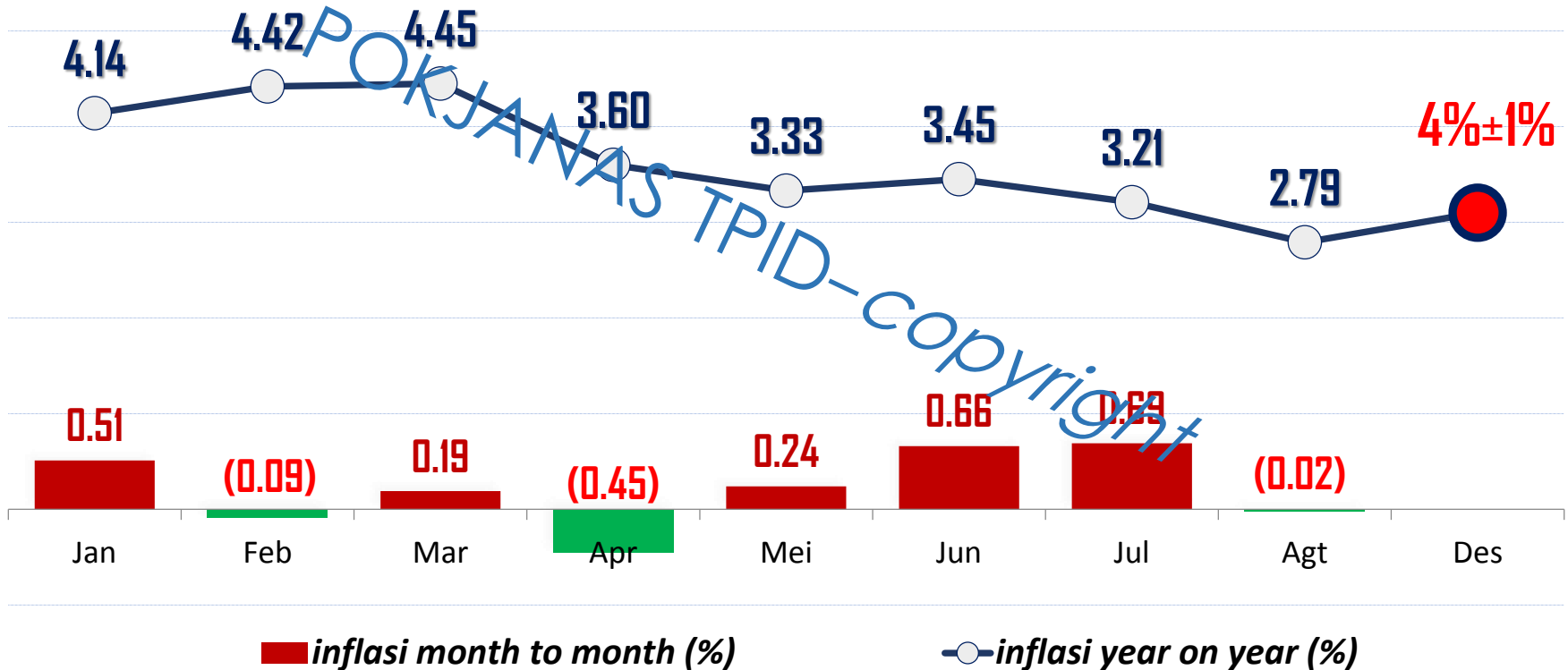
**FOKUS
DAERAH**

PENGENDALIAN

INFLASI

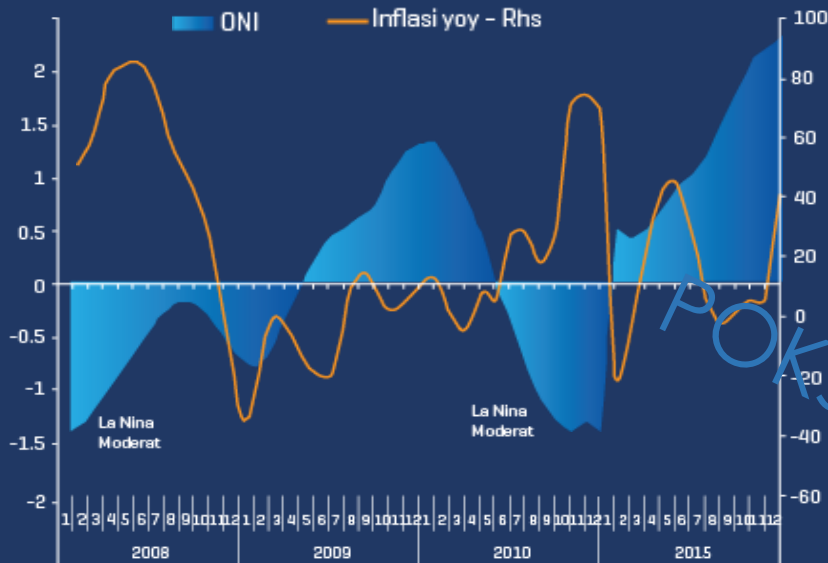
PERKEMBANGAN TERKINI INFLASI

- Hingga Agustus 2016, inflasi secara nasional cukup rendah sebesar 2,79% (yoy)
- Bahkan di Agustus 2016 mengalami deflasi 0,02% (mtm), lebih rendah dr historis 5 thn terakhir (0,72%, mtm)
- Inflasi 2016, diperkirakan akan berada pada batas bawah dari rentang sasaran $4 \pm 1\%$.

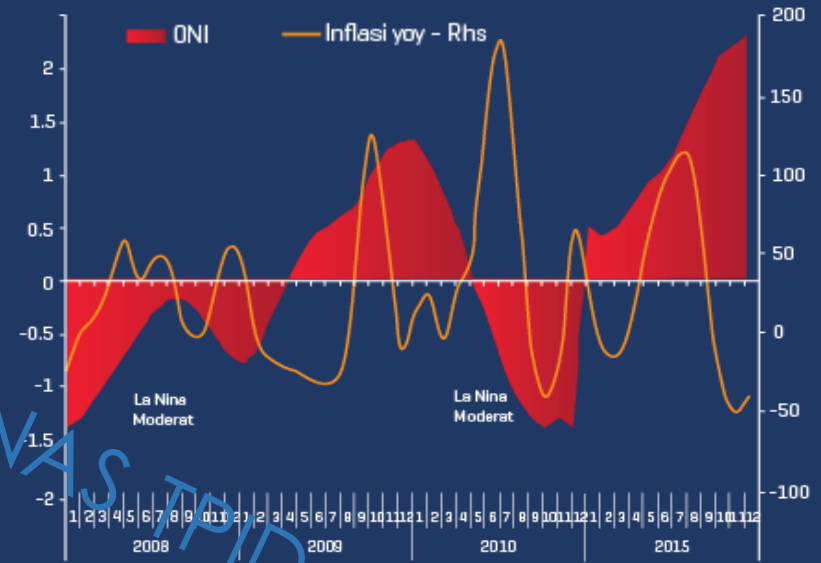


TANTANGAN INFLASI S.D AKHIR 2016

Cabai Merah



Bawang Merah

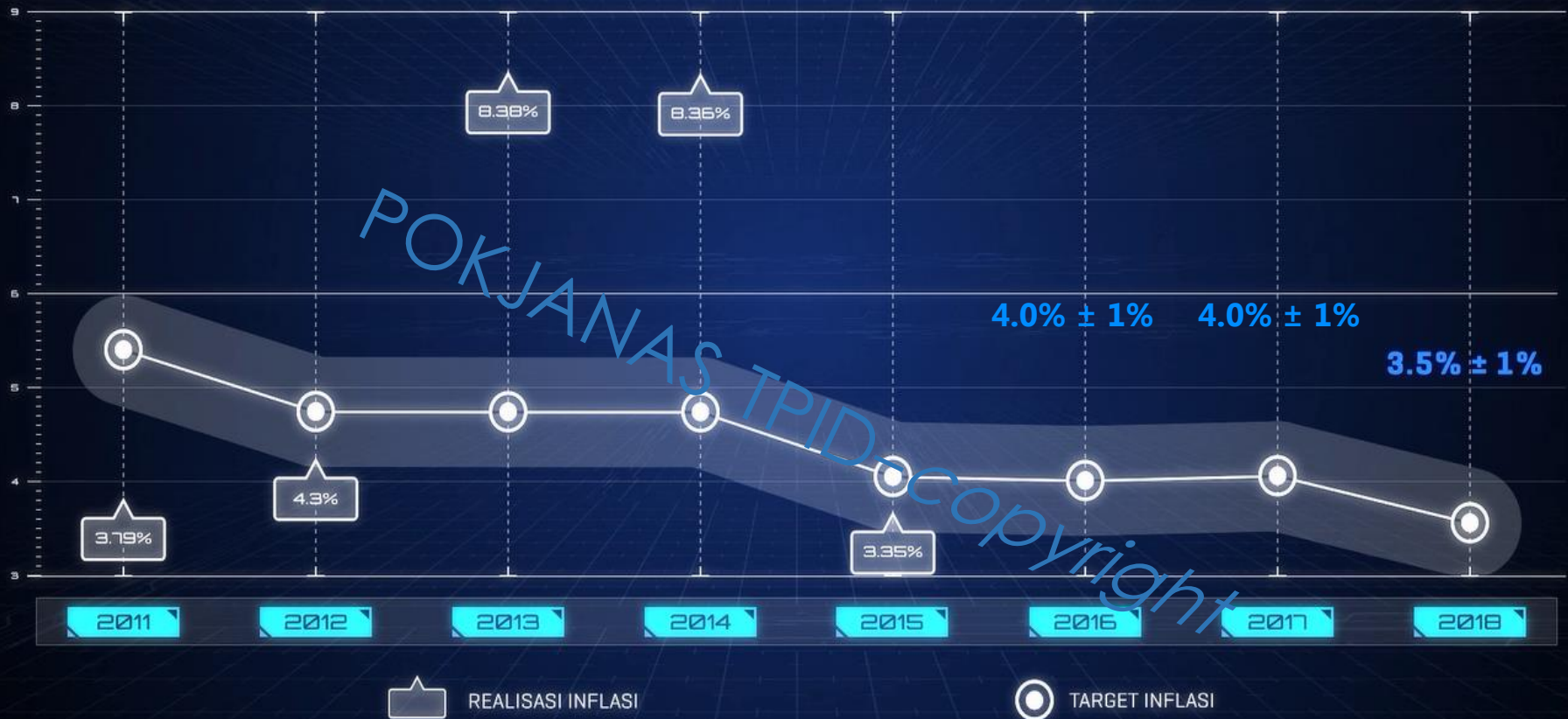


ONI: Oceanic Nino Index

- Pada 2016, risiko jangka pendek yang masih perlu diwaspadai adalah kenaikan harga pangan akibat fenomena La Nina yang akan mengganggu produksi pangan, terutama komoditi hortikultura (bawang, cabai) dan beras sebagaimana terjadi pada tahun 2008 dan 2010.



PERLU *EXTRA EFFORT* DAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BANK INDONESIA UNTUK MENCAPAI SASARAN INFLASI



Untuk mendukung sasaran inflasi nasional secara keseluruhan, maka sasaran inflasi volatile food (pangan) di 2016 dan 2017 adalah 4,1%, sedangkan untuk 2018 sebesar 3,6%

ARAHAN PRESIDEN RI PADA RAKORNAS VII TPID

1. Pemerintah Daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada **pencapaian pertumbuhan ekonomi** namun juga **pengendalian inflasi**.
2. Pemerintah Daerah harus **mempercepat realisasi APBD** untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga.
3. Pemerintah Daerah agar **merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian harga** disertai alokasi anggaran yang memadai.
4. Pemerintah Daerah agar **lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah** dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan.
5. Pemerintah Daerah agar **mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah** untuk stabilisasi harga yakni dengan:
 - a. **segera membentuk forum TPID**, khususnya bagi daerah yang belum memiliki TPID; dan
 - b. **bersama-sama penegak hukum untuk melakukan monitoring kewajaran stok pangan** di gudang-gudang secara berkala.
6. Pemerintah akan **memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat**, antara lain dengan
 - a. **mengoptimalkan peran Bulog** dalam pengelolaan stok pangan;
 - b. **melanjutkan dan memperluas program tol laut** disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi pendukung yang diperlukan;
 - c. **mempertimbangkan berbagai aspek dalam hal impor perlu dilakukan** agar tidak berimplikasi pada berkurangnya insentif masyarakat untuk memproduksi

RAPAT KOORDINASI NASIONAL VII

**TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH 2016**



FOKUS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH: HASIL **RAKORNAS** TPID VII 2016



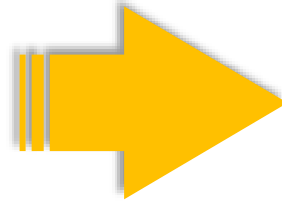
1. TPID perlu melakukan **terobosan kebijakan** sesuai dengan karakteristik daerah.
2. **Mengoptimalkan dana desa**, untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.
3. **Kerjasama dg Bulog** setempat, untuk memperkuat cadangan pangan daerah.
4. Efisiensi kelancaran distribusi pangan di **pelabuhan**.
5. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, untuk **monitoring stok** dan **pengawasan distribusi**.



TEROBOSAN KEBIJAKAN TPID : sesuai dengan karakteristik daerah

Pentingnya inovasi program TPID di daerah, karena kondisinya bervariasi

TPID JAWA TIMUR : SUBSIDI BIAYA ANGKUTAN



- Pengajuan proposal kepada Gubernur (komoditas, komponen biaya subsidi dan lokasi distribusi)
- Menunjuk SKPD Pelaksana
- Gubernur mengajukan permohonan dana hibah ke DPRD
- Pembahasan dengan produsen (penetapan komoditas, harga beli, kuota, dan titik distribusi)
- Penyaluran OP di pasar tradisional oleh produsen langsung
- Masyarakat membeli dgn harga produsen dikurangi bantuan ongkos angkut.

EMBRIO KONSEP TOL LAUT :

tahun 2016 telah menjadi 6 rute (tw II) dari awalnya 3 rute (2015)

KAPAL TERNAK :

Saat ini baru 1 kapal, tahun 2017 ditargetkan menjadi 6 (5 kapal sedang proses produksi)

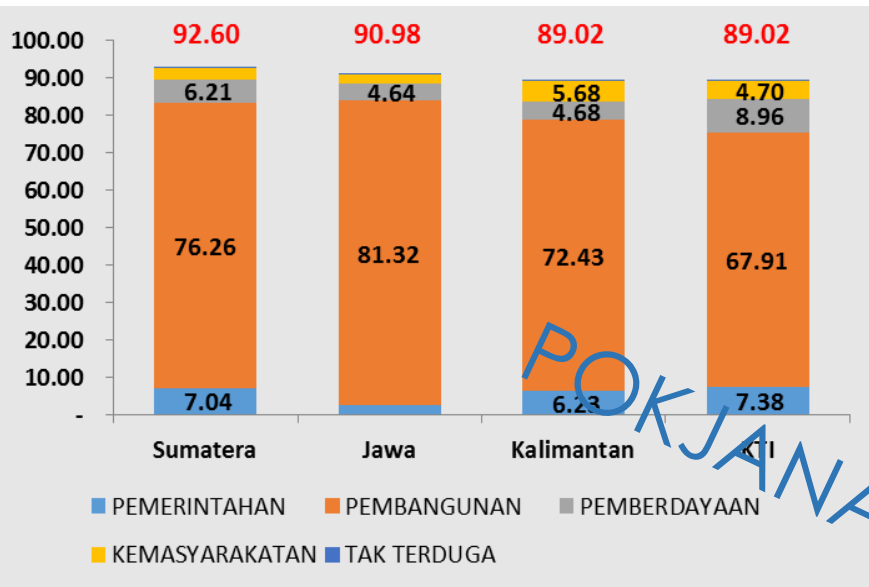
AKAN DIKEMBANGKAN TOL UDARA (DES 2016/2017)



PENGUATAN PRODUKSI : meningkatkan pasokan pangan daerah

Optimalisasi dana desa untuk peningkatan produksi pangan

Dari alokasi Dana Desa 2015 sebesar Rp20,7 T, direalisasi sebesar 90,26% senilai Rp18,7T, sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan (83%).



Sumber : DJPK (per 20/07/16)

Sumber: DJPK Berdasarkan data 337 kabupaten/kota yang melapor (97 tidak melapor). Hanya 225 data Kab/kota yang dapat diolah terkait kelengkapan data.

1

TPID Gorontalo

Dana desa digunakan untuk pemberian modal benih, pupuk dan sarana irigasi pertanian

2

TPID Bali

Melakukan perbaikan infrastruktur jalan pedesaan, di sentra pertanian (Gerbang Sadu Mandara)





DUKUNGAN BI **MENDORONG KETAHANAN PANGAN** MELALUI PROGRAM KLAS TER



PRIORITAS KOMODITI PANGAN : penyebab inflasi daerah

FOKUS KLAS TER PER REGIONAL (ZONASI)

SUMATERA | JAWA | KALIMANTAN | KTI

KLAS TER PADI

- Jumlah klaster 22 dgn luas lahan 3.327 ha dan jumlah produksi 16.125 ton.
- Lokasi utama : 1) 1.618 ha di Desa Patampanua & Desa Panicong; 2) 400 ha di Kab. Kutai Kartanegara, dan 3) 304 ha di Desa Singo Juruh, Lombok Kulon, dan Jatirogo.
- Jumlah petani anggota klaster 3.967 orang
- Pembiayaan/Kredit: Rp1,35 miliar (klaster Desa Singo Juruh Banyuwangi dan Desa Jatiroto; dan klaster di Desa Asinan Kec. Bawen.

KLAS TER CABAI

- Jumlah klaster 23 dgn luas lahan 149 ha dan jumlah produksi 756 ton
- Lokasi utama: 1) 38,5 ha di Desa Matoa, Oyehe, Aimasi, Udapi Hilir, Wariori, Meyuku, dan Manggupi; 2) 31,8 ha di Desa Sikulan, Kadomas, Sukarame dan Cimenreng; dan 3) 30 ha di Desa Wulhan.
- Jumlah petani anggota klaster 565 orang.
- Kredit/pembiayaan: Rp500 juta untuk klaster di Desa Wulhan

KLAS TER BAWANG MERAH

- Jumlah klaster 17, dgn luas lahan 823 ha, dan jumlah produksi 7.576 ton.
- Lokasi utama: 1) Kab. Majalengka 344 ha; 2) di Kabupaten Brebes seluas 239 ha; dan 3) di Desa Mojorembun dan Sukorejo, seluas 150 ha.
- Jumlah petani anggota klaster 1.201 orang.
- Pembiayaan: Rp7,06 miliar berasal dari Bank dan Koperasi

Kerja sama dengan Bulog: **PENGUATAN CADANGAN PANGAN**

TPID perlu menginisiasi program cadangan pangan daerah

Produsen Cabai (Kab. Batubara, Simalungun)



✓ Petani
✓ Poktan



✓ Gapoktan
✓ Koperasi



Gudang Bulog

POKJANAS

- Dijual ke pasar tradisional (**termasuk untuk operasi pasar**)
- Bulog berfungsi sebagai **stabilisator harga tingkat produsen dan konsumen**
- Kebutuhan industri cabai giling ± 10 ton/Bulan, dan industri cabai kering & cabai bubuk ± 5 ton/bulan

Captive Market

Pasar umum



Distribusi daerah lain



Industri (produk turunan)



- Cabai hasil produksi petani **dibeli oleh Bulog melalui Gapoktan/Koperasi.**
- Pemda memfasilitasi **pembentukan gapoktan/koperasi.**
- **Pemda memfasilitasi** kerja sama Bulog dengan gapoktan/koperasi.
- Hasil panen petani **tidak dibeli tengkulak** (memotong rantai distribusi).
- **Harga di tingkat petani** relatif lebih stabil.

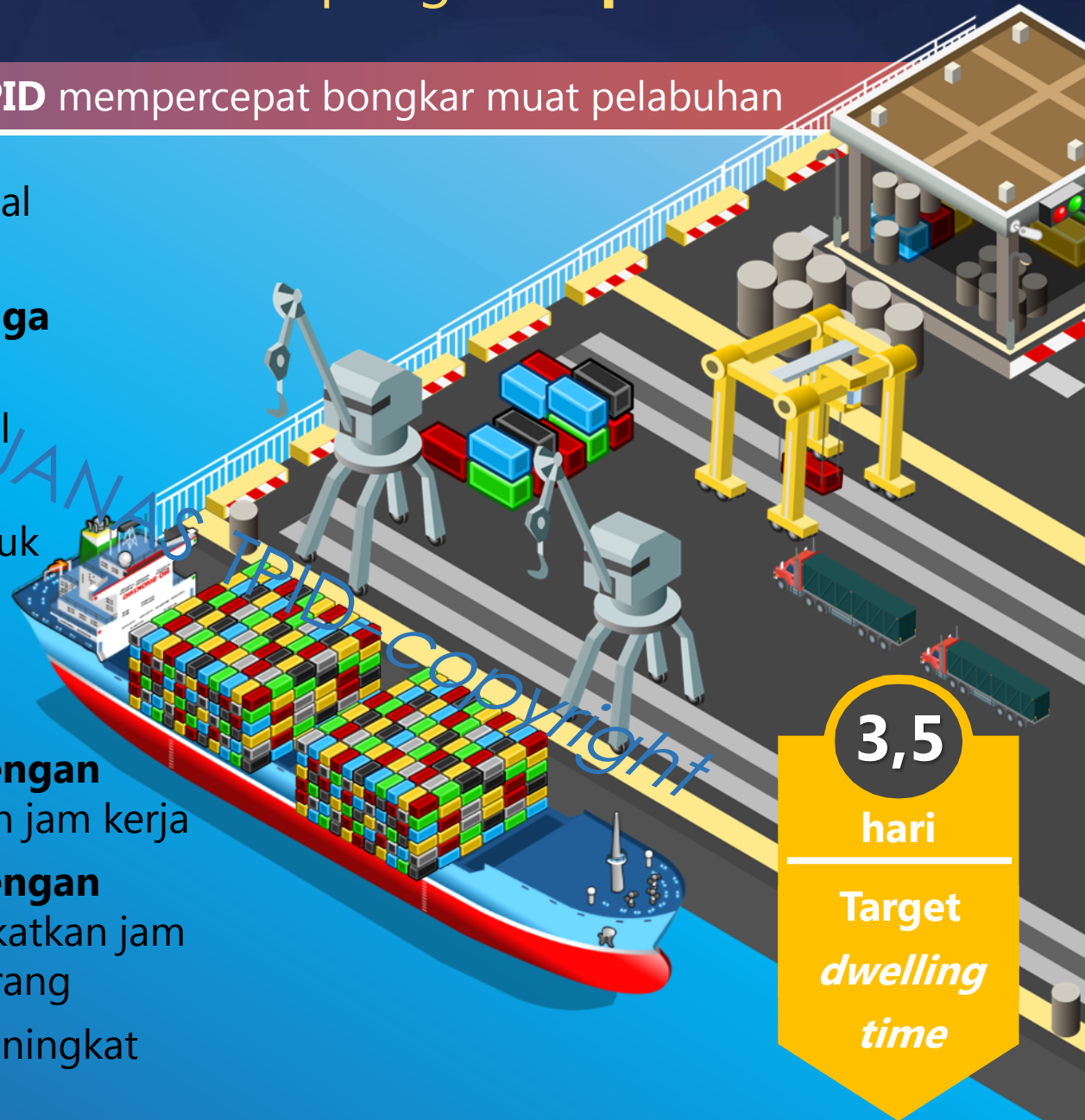
Meningkatkan efisiensi distribusi pangan di **pelabuhan**

PENTINGNYA **DUKUNGAN TPID** mempercepat bongkar muat pelabuhan

1. mengoptimalkan operasional pelabuhan (**> 10 jam/hari**)
2. dukungan operasional **tenaga bongkar muat** (TKBM)
3. pengaturan jam operasional gudang **penerima barang**
4. **pengaturan lalu lintas** untuk angkutan pangan

Case study TPID NTT

1. Melakukan **komunikasi dengan TKBM** untuk meningkatkan jam kerja
2. Melakukan **komunikasi dengan pengusaha** untuk meningkatkan jam kerja gudang penerima barang
3. Aktivitas bongkar muat meningkat dari **10 jam 18 jam (80%)**



3,5

hari

Target
dwelling
time

Memperkuat pengawasan: **STOK PANGAN DAN DISTRIBUSI**

PENTINGNYA PENGAWASAN LANGSUNG DI DAERAH

- Untuk **meminimalkan upaya spekulasi**, pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara berkala.
- Terkait hal ini, **TPID dapat bekerja sama dengan seluruh anggota TPID**
- Langkah ini **diperkuat dengan kegiatan komunikasi yang intens melalui berbagai media**
- Inspeksi langsung ke pasar, dan gudang pengusaha cukup efektif meredam spekulasi, khususnya menjelang hari besar keagamaan.





BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH